

**EFEKTIVITAS SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jumania Septariani¹

¹ STIE Rahmaniyyah Sekayu, Sekayu, Indonesia, jseptariani@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Effectiveness of Local Revenue Sources in Increasing the Regional Financial Independence of Musi Banyuasin Regency at the Regional Levy Tax Management Agency in Musi Banyuasin Regency. The method used in this study is quantitative which is qualified by using primary and secondary data in the form of PAD budget realization reports, that is by analyzing data and information relevant to the problem, using effectiveness ratios and independence ratios in the form of fiscal autonomy ratios and routine capability index ratios. Based on the ratio of effectiveness of Local Revenue (PAD) on average from 2014-2017 to 89,48%, stated to be less effective because it is less than the standard, which is 90%. Based on the Independence Ratio seen from the ratio of fiscal autonomy, PAD is realized on an average of 8% with very less criteria, seen from the ratio of routine ability index to the average realized 8% with criteria also very low, which means the Regional Government of Musi Banyuasin Regency depend on funds from the Central Government. Although the level of effectiveness and independence is still lacking or low. However, in total regional income, PAD is quite good in promoting financial independence of the Regional Government of Musi Banyuasin Regency.

Keywords: *Effectiveness; Source of Revenue; PAD; Regional Financial Independence.*

PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

Untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, maka dibutuhkan kesiapan dana yang relatif cukup besar, sehingga daerah diharapkan mampu menggali berbagai potensi sumber-sumber keuangan daerah. Sumber-sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur

ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. PAD itu sendiri terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kemampuan perolehan PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerahnya semakin baik. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti DAK, DAU, dan DBH, untuk melihat efektifitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD sehingga dapat diketahui kondisi riil daerah.

Dengan rasio efektifitas dapat digambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektifitas, kemampuan daerah semakin baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah tersebut dapat dikatakan mandiri.

Melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemecahan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yang khusus menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka *Desentralisasi* di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin di dalam pelaksanaan tugasnya dapat lebih fokus dalam mengelola PAD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Pelaksanaan pemerintah daerah yang otonom, menuntut penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip keterbukaan (*transparansi*), mengutamakan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*accountability*).

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat tertentu. Untuk memperoleh data yang objektif dan valid maka perlu teknik pengumpulan data sebagai landasan pemecahan masalah. Menurut Subagyo (2010:37), ada beberapa prosedur pengumpulan data yang dapat digunakan yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu studi atau penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan jalan membaca, mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, catatan kuliah dan

sumber bacaan lain berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai gambaran umum perusahaan dan data-data yang relevan dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi ke tempat-tempat yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para pejabat yang berwenang atau pada bagian yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui naskah-naskah kearsipan, dan dokumen-dokumen tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi ini yaitu meneliti bahan-bahan tulisan yang ada di BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian diolah menjadi data penunjang dalam pembahasan penelitian ini.

Menurut Sanusi (2011:115), teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Analisis data mempunyai tujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada suatu penelitian. Teknik analisis merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode atau alat tertentu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis data atau informasi pada BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran sebagai sumber data dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan tersebut sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif yang dikualitatifkan yaitu dengan menganalisis data atau informasi secara jelas mengenai permasalahan yang ada dengan menggunakan data-data dan informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut, dengan menggunakan rasio efektivitas, otonomi fiskal dan indeks kemampuan rutin. Rasio keuangan tersebut dapat digambarkan dalam tabel 1 dan tabel 2, rasio pengukuran efektivitas dan rasio kemandirian serta kriteria pengukurannya sebagai berikut :

Tabel 1
Rasio Pengukuran Efektivitas

VARIABEL	PENGUKURAN	SKALA
RASIO EFEKTIFITAS PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Anggaran PAD}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Halim (2004 : 284)

Tabel 2
Rasio Kemandirian

VARIABEL	PENGUKURAN	SKALA
OTONOMI FISKAL	$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
INDEKS KEMAMPUAN RUTIN	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Belanja Rutin}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Halim (2004 : 284)

Tabel 3
Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kriteria	Rasio efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	<75

Sumber : Halim (2004 : 284)

Tabel 4
Kriteria Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0 – 25
Rendah	>25 – 50
Sedang	>50 – 75
Tinggi	>75 – 100

Sumber : Halim (2004 : 284)

Rasio Pengukuran Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi rill}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik karena semua rencana benar-benar terlaksana dan hal itu berarti bahwa kinerjanya terbukti. Efektivitas kemampuan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari Tabel 5 berikut :

Tabel 5
Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2014-2017

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas	Standar	Kriteria
2014	187.662.566.249,91	172.924.886.329,95	92,15 %	90-99	Cukup Efektif
2015	209.791.395.154,85	181.795.444.466,14	86,66 %	75-89	Kurang Efektif
2016	194.791.249.316,31	169.012.416.526,06	86,77 %	75-89	Kurang Efektif
2017	226.673.797.781,00	209.343.119.213,73	92,35 %	90-99	Kurang Efektif
Jumlah rata-rata			89,48%	75-89	Kurang Efektif

Sumber : BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018, data diolah

Pada Tabel 5 di atas, dapat dilihat dan diketahui bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam 4 (empat) tahun terakhir (2014-2017) apabila dinilai dari kriteria penilaian, maka efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin termasuk dalam 2 (dua) kategori yaitu, pada Tahun 2014 dan 2017 rasio efektivitas PAD masuk dalam kategori cukup efektif, hal ini dipicu oleh adanya beberapa event di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2014 dan Tahun 2017 penetapan target anggaran sudah sesuai dengan kondisi rill yang ada.

Sedangkan pada Tahun 2015 dan 2016 rasio efektivitas PAD masuk dalam kategori kurang efektif karena pada tahun tersebut banyak jenis objek pajak yang tidak tercapai realisasinya dari target anggaran yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio efektivitas PAD di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2014-2017, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

secara rata-rata sebesar 89,48% termasuk kurang efektif, karena kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan potensi rill yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin masih kurang.

Rasio Kemandirian

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan.

Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah bisa dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antar lain Rasio Kemandirian (otonomi fiskal), Rasio Indeks Kemampuan Rutin.

Tabel 7
Rasio Kemandirian

VARIABEL	PENGUKURAN	SKALA
OTONOMI FISKAL	$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
INDEKS KEMAMPUAN RUTIN	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Belanja Rutin}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Halim (2004 : 284)

1. Rasio Otonomi Fiskal

Rasio otonomi fiskal merupakan salah satu rasio untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, dengan cara melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Untuk perhitungan rasio Otonomi fiskal dapat dilihat dari perhitungan berikut :

OF = Otonomi Fiskal

TPAD = Total PAD

TPD = Total Pendapatan daerah

R = rata-rata

Perhitungan kemandirian daerah menggunakan rasio otonomi fiskal pada :

Tahun 2014 :

$$OF = \frac{\text{Rp. } 172.924.886.329,95}{\text{Rp. } 2.970.744.827.254,56} \times 100\%$$

$$OF_1 = 6 \%$$

Tahun 2015 :

$$OF = \frac{\text{Rp. } 181.795.444.466,14}{\text{Rp. } 1.852.605.900.101,48} \times 100\%$$

$$OF_2 = 10 \%$$

Tahun 2016 :

$$OF = \frac{\text{Rp. } 169.012.416.526,06}{\text{Rp. } 2.471.242.780.879,00} \times 100\%$$

$$OF_3 = 7 \%$$

Tahun 2017 :

$$OF = \frac{\text{Rp. } 209.343.119.213,73}{\text{Rp. } 2.471.242.780.879,00} \times 100\%$$

$$OF_4 = 9 \%$$

Maka rata-rata persentase dari Tahun 2014-2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} OF_1 + OF_2 + OF_3 + OF_4 / 4 &= R \\ 6 + 10 + 7 + 9 / 4 \times 100\% &= 8 \% \end{aligned}$$

Kemandirian daerah Kabupaten Musi Banyuasin dihitung dengan rasio otonomi fiskal selama Tahun 2014-2017 memperoleh nilai rata-rata 8 % dan jika dilihat dalam skala interval rasio otonomi fiskal masuk dalam kategori sangat kurang. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 6 dan Tabel 7 yang merupakan rekapitulasi serta skala interval rasio otonomi daerah.

Tabel 6
Rekapitulasi
Perhitungan Kemandirian Daerah dalam Rasio Otonomi Fiskal
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2014 -2017

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Total PAD	Rasio Otonomi Fiskal	Standar	Skala
2014	2.970.744.827.254,56	172.924.886.329,95	6 %	00,00-10,00	Sangat kurang
2015	1.852.605.900.101,48	181.795.444.466,14	10 %	00,00-10,00	Sangat kurang
2016	2.471.242.780.879,00	169.012.416.526,06	7 %	00,00-10,00	Sangat kurang
2017	2.433.365.970.889,00	209.343.119.213,73	9 %	00,00-10,00	Sangat kurang
Jumlah Rata-rata			8 %	00,00-10,00	Sangat kurang

Sumber : BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018, data diolah

Dengan menggunakan perhitungan rasio otonomi fiskal Tabel 6 di atas dapat disimpulkan, bahwa perhitungan rasio otonomi fiskal Kabupaten Musi Banyuasin dalam kategori sangat kurang yang artinya Pemerintah Daerah masih sangat ketergantungan dari dana pusat berupa pendapatan transfer dan lain lain pendapatan yang sah dalam menjalankan Pemerintahan otonom.

2. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Rasio Indeks Kemampuan Rutin, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan belanja melalui perspektif pengeluaran pada suatu Pemerintahan Daerah, dengan menggunakan rasio indeks kemampuan rutin ini juga kita dapat melihat dan menyimpulkan bagaimana kemampuan belanja melalui perspektif pengeluaran pada Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk perhitungan rasio indeks kemampuan rutin Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari perhitungan berikut :

IKR = Indeks Kemampuan Rutin

TPAD = Total PAD

TBR = Total Belanja Rutin

R = Rata-rata

Perhitungan kemandirian daerah menggunakan rasio indeks kemampuan rutin :

Tahun 2014 :

$$\text{IKR} = \frac{\text{Rp. 172.924.886.329,95}}{\text{Rp. 3.517.904.364.388,05}} \times 100\%$$

$$IKR_1 = 5 \%$$

Tahun 2015 :

Rp. 181.795.444.466,14

$$IKR = \frac{\text{Rp. 181.795.444.466,14}}{\text{Rp. 1.899.319.701.303,00}} \times 100\%$$

$$IKR_2 = 10 \%$$

Tahun 2016 :

Rp. 169.012.416.526,06

$$IKR = \frac{\text{Rp. 169.012.416.526,06}}{\text{Rp. 2.625.127.073.243,89}} \times 100\%$$

$$IKR_3 = 6 \%$$

Tahun 2017 :

Rp. 209.343.119.213,73

$$IKR = \frac{\text{Rp. 209.343.119.213,73}}{\text{Rp. 2.340.644.994.246,46}} \times 100\%$$

$$IKR_4 = 9 \%$$

Maka rata-rata persentase dari Tahun 2014-2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & IKR_1 + IKR_2 + IKR_3 + IKR_4 / 4 = R \\ & 0,05 + 0,10 + 0,06 + 0,09 / 4 = 0,08 \% \end{aligned}$$

Sama halnya dengan rasio otonomi fiskal, perhitungan untuk melihat kemampuan belanja melalui perspektif pengeluaran dengan menggunakan rasio indeks kemampuan rutin pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan rata-rata 8 % dan dalam skala interval rasio indeks kemampuan rutin masuk dalam kategori sangat kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rekapitulasi Tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7
Rekapitulasi
Perhitungan Belanja Rutin dalam Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2014 -2017

(dalam rupiah)

Tahun	Total Belanja Rutin	Total Pendapatan Asli Daerah	Indeks Kemampuan Rutin	Standar	Kriteria
2014	3.517.904.364.388,05	172.924.886.329,95	5 %	00,00-20,00	Sangat kurang
2015	1.899.319.701.303,00	181.795.444.466,14	10 %	00,00-20,00	Sangat kurang
2016	2.625.127.073.243,89	169.012.416.526,06	6 %	00,00-20,00	Sangat kurang

2017	2.340.644.994.246,46	209.343.119.213,73	9 %	00,00-20,00	Sangat kurang
Jumlah Rata-rata			8 %	00,00-20,00	Sangat kurang

Sumber : BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 data diolah

Dilihat dari skala interval rasio indeks kemampuan rutin, Kabupaten Musi Banyuasin, kemampuan belanja melalui perspektif pengeluaran sebesar 8% masuk dalam kategori sangat kurang, yang artinya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tidak dapat menutupi kebutuhan belanja rutin. Ketergantungan terhadap dana transfer dan pendapatan daerah lainnya yang sah merupakan penunjang utama dan penentu pada kemampuan belanja rutin.

Dengan menggunakan rasio-rasio yang telah diuraikan di atas dapat dilihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah, apakah sumber pendapatan asli daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif atau belum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis menyimpulkan hasil dari analisis sebagai berikut : Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata dari Tahun 2014 sampai Tahun 2017 sebesar 89,48 %, hal ini dapat dikatakan kurang efektif karena dengan target yang ditetapkan bernilai kurang dari 90 %. Dengan realisasi pendapatan asli daerah secara rata-rata 90% maka pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin baru dapat dikatakan efektif. Untuk Rasio Kemandirian, secara rata-rata rasio otonomi Fiskal sebesar 0,08% atau 8% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini berarti kecenderungan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah, dan jika dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2014-2017 secara rata-rata sebesar 0.08% atau 8% dengan kriteria juga sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki ketergantungan dengan Pemerintah Pusat. Meskipun tingkat efektivitas dan kemandirian masih kurang atau rendah, namun secara total pendapatan daerah bahwa PAD cukup baik dalam mendorong kemandirian keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hendaknya melakukan langkah optimalisasi pemungutan pendapatan asli daerah khususnya di bidang pajak daerah yaitu pada pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan, mengingat dari realisasi pendapatan pajak daerah kedua objek pajak tersebut dari tahun ke tahun realisasinya selalu di bawah target dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan melakukan upaya dalam optimalisasi yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang professional masih sangat diperlukan serta pengoptimalan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan kemampuan pembiayaan keuangan daerah.

Berdasarkan perhitungan secara Rasio Otonomi Fiskal yang hanya mencapai 0,08% dengan kriteria sangat kurang, maka hendaknya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat merangkul Perusahaan Daerah (BUMD) yang merupakan salah satu sumber pemasok dana ke kas daerah harus lebih professional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat, guna menunjang ekonomi kerakyatan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara maksimal dengan sumber keuangan yang ada.

REFERENSI

- Bratakusumah dan Solihin, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta Gramedia
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta. Salemba Empat
- _____ 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. : Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, 2011. *Keuangan Negara*, Edisi keenam. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Bogdan. dan Taylor. 2004. Dalam Maleong. *Metode Penelitian*, Carbondale: Southern Illionia University Press
- Sanusi, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta .Salemba Empat
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Direktorat Jendral Otonomi Daerah. Jakarta
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dirjen Perpajakan
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Suryadi. 2012. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- Luigi L.D.B. 2015. Analisis PAD di Kota Jaya Pura.
- Asoka, Rano. 2016. Analisis Pendapatan Daerah (PAD) Terhadap Kemampuan Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.